Kemenkes
BKK Kelas I Banten

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITED TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinya.

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawabandan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Banten, 17 Januari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran

Drg Resi Arisandi, MM., MH, SH

NIP. 197306292002121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI ii

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB 4

LAPORAN KEUANGAN 5

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN ..... **Error! Bookmark not defined.**

II. NERACA 12

III. LAPORAN OPERASIONAL 13

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ..... **Error! Bookmark not defined.**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Penjelasan Umum *14*

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran *31*

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca *37*

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional *44*

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas *51*

F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya *53*

Kementerian Kesehatan
BKK Banten
Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No. 21, Kota Cilegon 42438
(0254)7835333
http://kkpbanten.org

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Banten, 17 Januari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Drg Resi Arisandi, MM.,MH,SH
NIP. 197306292002121003

LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BKK Kelas I Banten Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu, dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Secara ringkas Laporan Keuangan BKK Kelas I Banten TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 4.022.847.282, atau mencapai 157.39 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.556.040.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 17.668.109.130, atau mencapai 97,14 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 18.193.150.000,. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1

Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024			31 Des 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Negara	**2,556,040,000**	**4,022,847,282**	**157.39**	**2,631,054,155**
PNBP	2,556,040,000	4,022,847,282	157.39	2,631,054,155
Belanja Negara	**18,193,150,000**	**17,668,109,130**	**97.11**	**15,355,199,085**
51 Belanja Pegawai	10,777,786,000	10,418,480,496	96.67	8,850,638,821
52 Belanja Barang	5,782,864,000	5,617,438,534	97.14	6,261,174,014
53 Belanja Modal	1,632,500,000	1,632,190,100	99.98	243,386,250

B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 27.967.986.757, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 2.039.258.541; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 25.844.704.216; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 84.024.000. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 84.024.000 dan Rp 27.883.962.757.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2

Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Des 2024	31 Des 2023	(Rp.)	%
Aset				
Aset Lancar	Rp 2.039.258.541	Rp 1.798.160.585	241.097.956	13,41
Aset Tetap	Rp 25.844.704.216	Rp 24.864.795.830	979.908.386	3,94
Aset Lainnya	Rp 84.024.000	Rp -	84.024.000	0,00
Jumlah Aset	**27.967.986.757**	**26.662.956.415**	**1.305.030.342**	**4,89**
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	Rp 84.024.000	Rp -	84.024.000,00	0,00
Ekuitas				
Ekuitas	Rp 27.883.962.757	Rp 26.662.956.415	1.221.006.342,00	4,58
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**27.967.986.757**	**26.662.956.415**	**1.305.030.342**	**4,89**

C. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 4.016.695.001, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 17.575.475.298 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp 13.558.780.297. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp6.152.281 sehingga entitas BKK Kelas I Banten mengalami Defisit-LO sebesar Rp 13.552.628.016.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Ringkasan Laporan Operasional
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Periode yg Berakhir sampai dengan		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Des 2024	31 Des 2023	(Rp.)	%
Pendapatan				
PNBP	Rp 4,016,695,001	Rp 2,624,488,505	1,392,206,496	53.05
Jumlah Pendapatan	**4,016,695,001**	**2,624,488,505**	**1,392,206,496**	**53.05**
Beban				
Beban Pegawai	Rp 10,418,480,496	Rp 8,850,638,821	1,567,841,675	17.71
Beban Persediaan	Rp 656,046,169	Rp 1,169,961,244	(513,915,075)	(43.93)
Beban Barang dan Jasa	Rp 2,885,774,398	Rp 2,945,293,373	(59,518,975)	(2.02)
Beban Pemeliharaan	Rp 896,460,638	Rp 810,143,559	86,317,079	10.65
Beban Perjalanan Dinas	Rp 1,287,556,883	Rp 1,652,719,069	(365,162,186)	(22.09)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp 1,431,156,714	Rp 1,445,121,200	(13,964,486)	(0.97)
Jumlah Beban	**-17,575,475,298**	**-16,873,877,266**	**(701,598,032)**	**4.16**
Defisit Kegiatan Operasional	**13,558,780,297**	**14,249,388,761**	**(690,608,464)**	**(4.85)**
Kegiatan Non Operasional				
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	Rp 6,152,281	Rp 3,300,700	2,851,581	86.39
Defisit-LO	**13,552,628,016**	**14,246,088,061**	**(693,460,045)**	**(4.87)**

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp26.662.956.415 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp 13.552.628.016; kemudian dikurangi Koreksi yang mengurangi nilai ekuitas sebesar Rp0, kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 14.773.634.358, dan kenaikan ekuitas sebesar Rp 1.221.006.342, sehingga Ekuitas entitas BKK Kelas I Banten pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 27.883.962.757.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Periode yg Berakhir sampai dengan		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Des 2024	31 Des 2023	(Rp.)	%
Ekuitas Awal	Rp 26.662.956.415	Rp 27.596.928.126	-933.971.711	-3,38
Defisit LO	Rp (13.552.628.016)	Rp (14.246.088.061)	693.460.045	-4,87
Transaksi Antar Entitas	Rp 14.773.634.358	Rp 13.312.116.350	1.461.518.008	10,98
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	Rp 1.221.006.342	Rp (933.971.711)	2.154.978.053	-230,73
Ekuitas Akhir	**27.883.962.757**	**26.662.956.415**	**1.221.006.342**	**4,58**

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

Informasi penting terkait pelaksanaan anggaran:

a. Jumlah Wilker dan Pos BKK Kelas I Banten TA 2024 sesuai DIPA dengan pagu anggaran belanja sebesar Rp 18.193.150.000.

b. Jumlah DIPA sebanyak 4 Wilker dan 1 pos ferry dengan rincian sesuai jenis kewenangan dan hubungan kerja dengan KPPN.

c. Satker BKK Kelas I Banten memperoleh dan melaksanakan anggaran sampai dengan periode Desember 2024, selanjutnya dilakukan pengintegrasian tugas, fungsi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran terkait pelayanan ke seluruh wilker yang ada di BKK Kelas I Banten pada periode Desember 2024.

Berikut ini total anggaran belanja seluruh satker di lingkungan BKK Kelas I Banten:

Tabel 5
Total Anggaran Belanja BKK Kelas I Banten TA 2024 dan TA 2023

No.	Satuan Kerja	TA 2024	TA 2023	%
1	Belanja Pegawai	Rp10.777.786.000	Rp10.418.480.496	3,33
2	Belanja Barang	Rp5.782.864.000	Rp5.617.438.534	2,86
3	Belanja Modal	Rp1.632.500.000	Rp1.632.190.100	0,02
Jumlah Anggaran		**18.193.150.000**	**17.668.109.130**	**2,89**

Informasi penting terkait penyusunan Laporan Keuangan TA 2024:

a. Penyusunan Laporan Keuangan Satker seluruhnya telah dilakukan pelaporan secara berjenjang menggunakan aplikasi SAKTI;

b. Unit Akuntansi Wilayah Vertikal dibentuk dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2007/2023 tentang

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Wilayah Vertikal Kementerian Kesehatan.

c. Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan tingkat Satker dilakukan reviu oleh SKI.

d. Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan BKK Kelas I Banten telah dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Perbendaharaan dan Pelayanan Negara (KPPN) melalui aplikasi MONSAKTI.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BKK Kelas I Banten
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 Desember 2024 DAN 31 Desember 2023

Uraian	31 Des 2024			31 Des 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Negara	**2,556,040,000**	**4,022,847,282**	**157.39**	**2,689,600,000**
PNBP	Rp 2,556,040,000	Rp 4,022,847,282	157.39	Rp 2,689,600,000
Belanja Negara	**18,193,150,000**	**17,668,109,130**	**97.11**	**15,568,650,000**
51 Belanja Pegawai	Rp 10,777,786,000	Rp 10,418,480,496	96.67	Rp 8,874,073,000
52 Belanja Barang	Rp 5,782,864,000	Rp 5,617,438,534	97.14	Rp 6,448,577,000
53 Belanja Modal	Rp 1,632,500,000	Rp 1,632,190,100	99.98	Rp 246,000,000

II. NERACA

BKK Kelas I Banten
NERACA
PER 31 Desember 2024 DAN 31 Desmber 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Des 2024	31 DES 2023
ASET			
ASET LANCAR	**C.1**		
Persediaan	C.1.4	2,039,258,541	1,798,160,585
Jumlah Aset Lancar		2,039,258,541	1,798,160,585
ASET TETAP	**C.2**		
Tanah	C.2.1	14,705,265,280	14,705,265,280
Peralatan dan Mesin	C.2.2	20,032,740,297	17,362,050,197
Gedung dan Bangunan	C.2.3	8,708,186,698	8,708,186,698
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(17,601,488,059)	(15,910,706,345)
Jumlah Aset Tetap		25,844,704,216	24,864,795,830
ASET LAINNYA	**C.3**		
Dana yang dibatasi penggunaannya	C.3.2	84,024,000	-
Aset Lain-Lain	C.3.3	100,214,320	100,214,320
Akum. Penyusutan dan Amortisasi Aset Lain	C.3.4	(100,214,320)	(100,214,320)
Jumlah Aset Lainnya		84,024,000	-
JUMLAH ASET		**27,967,986,757**	**26,662,956,415**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**C.4**		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	84,024,000	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		84,024,000	-
JUMLAH KEWAJIBAN		84,024,000	-
EKUITAS	**C.5**		
Ekuitas	C.5	27,883,962,757	26,662,956,415
JUMLAH EKUITAS		27,883,962,757	26,662,956,415
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**27,967,986,757**	**26,662,956,415**

III. LAPORAN OPERASIONAL

BKK Kelas I Banten
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 Desember 2024 DAN 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	31 DES 2024	31 DES 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	4016695001	2624488505
JUMLAH PENDAPATAN		**4,016,695,001**	**2,624,488,505**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	10,418,480,496	8,850,638,821
Beban Persediaan	D.3	656,046,169	1,169,961,244
Beban Barang dan Jasa	D.4	2,885,774,398	2,945,293,373
Beban Pemeliharaan	D.5	896,460,638	810,143,559
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1,287,556,883	1,652,719,069
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	1,431,156,714	1,445,121,200
JUMLAH BEBAN		**17,575,475,298**	**16,873,877,266**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(13,558,780,297)	(14,249,388,761)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar		**-**	**735,050**
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			4,000,000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			3,264,950
Surplus (Defisit) Keg. Non Operasional Lainnya		**6,152,281**	**2,565,650**
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		6,152,281	2,565,650
SURPLUS /DEFISIT DARI KEG NON OPERASIONAL	D.10	6,152,281	3,300,700
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(13,552,628,016)	(14,246,088,061)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) - LO		**(13,552,628,016)**	**(14,246,088,061)**

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BKK Kelas I Banten
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 Desember 2024 Dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DES 2024	31 DES 2023
EKUITAS AWAL	E.1	**26,662,956,415**	**27,596,928,126**
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(13,552,628,016)	(14,246,088,061)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	*E.6*	14,773,634,358	13,312,116,350
KENAIKAN /PENURUNAN EKUITAS		**1,221,006,342**	**(933,971,711)**
EKUITAS AKHIR	E.7	**27,883,962,757**	**26,662,956,415**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Umum

Dasar Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada ;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.5/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas ;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi ;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2024 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Akuntansi dan Penyusunan Laporan keuangan Kementerian Kesehatan;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor

81/KMK.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KMK.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas ;

20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka penyusutan BMN berupa Aset Tetap Pada Entitas ;
21. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
22. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-273/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
23. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor S-31/PB/PB.6/2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL Tahun 2024 *(Unaudited).*

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan TA 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BKK Kelas I Banten. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Modul GLP, Modul Aset dan Modul Persediaan. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan

Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan Modul Aset dan Persediaan adalah sistem yang menghasilkan informasi persediaan, aset tetap, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan BKK Kelas I Banten TA 2024 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah BKK Kelas I Banten yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BKK Kelas I Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang merupakan entitas pelaporan dari BKK Kelas I Banten. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BKK Kelas I Banten adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) *Pendapatan- LRA*

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah Netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) *Pendapatan- LO*

- Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saattimbulnya hakatas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BKK Kelas I Banten adalah sebagai berikut:
    - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
    - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
    - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah Netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) *Belanja*

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara

pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/ jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) *Beban*

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/ jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) *Aset*

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Kebijakan Penyisihan Piutang berdasarkan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga

perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000; (satu juta rupiah);

  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah);

  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa penggunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas . Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	40 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 50 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. *Aset Lainnya*

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat

tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 81/KM.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.5/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas .

Tabel 8
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	**Masa Manfaat (tahun)**
Software Komputer	4
Franchise, Peta RBI Skala Besar, Peta LPI Skala Besar, Peta Batas Wilayah Administrasi, Citra Satelit Resolusi Tinggi, Foto Udara, Peta Tematik Morfometri, Peta Tematik Penutup Lahan, Peta Tematik Sistem Lahan, Peta Tematik Lainnya	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Peta RBI Skala Menengah, Peta Batas Wilayah Administrasi, Peta Batas Negara, Data Pengukuran Sifat Dasar Teliti, Citra Satelit Resolusi Sedang, Atlas	10
Peta LLN Skala Menengah, Peta LPI Skala Menengah	12
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim, Peta LLN Skala Kecil, Peta LPI Skala Kecil, Data Pasang Surut, Data GNSS, Data Gaya berat	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produsen Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) *Kewajiban*

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  a. Kewajiban Jangka Pendek

     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

     Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih HarusDibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  b. Kewajiban Jangka Panjang

     Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung yang kemudian disesuaikan apabila ada pemenuhan kewajiban, baik sebagian maupun keseluruhan.

Ekuitas

(7) *Ekuitas*

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan

lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Capaian Output Satker

A.6. Capaian Output Satker

Sampai dengan periode 31 Desember 2024, kertas kerja capaian output pada satker BKK Kelas I Banten adalah sebagai berikut:

Tabel 9

Kertas Kerja Capaian Output Satker BKK Kelas I Banten

No	Nama Satker	DIPA Revisi Ke-	Jumlah output DIPA	Konfirmasi Capaian Output			% Data Masuk
				Terkonfirmasi	Tidak Terkonfirmasi	Jumlah	
1	BKK Kelas I Banten	12	35	35	0	35	100

A.7. Capaian Output Program Prioritas Nasional

Capaian Output Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada BKK Kelas I Banten terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional III dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP.

Pelaksanaan Program Prioritas Nasional III - Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, melalui kegiatan prioritas yang terdapat pada BKK Kelas I Banten yang tersebar di empat unit kerja dan satu pos ferry dengan pagu mencapai Rp 2.556.040.000, dan realisasi sebesar Rp 4.022.847.282.

Rincian kertas kerja capaian output di BKK Kelas I Banten adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Kertas Kerja Capaian Output Kegiatan Prioritas
BKK Kelas I Banten

No	Nama Satker	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)		
			Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	TPCRO (%)
1	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah (HS)	Rp24.660.000	Rp23.341.300	94,7	10	kegiatan	10
2	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Pelayanan kesehatan haji (HS)	Rp108.000.000	Rp100.962.483	93,5	8750	Orang	8750
3	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (HS)	Rp63.526.000	Rp56.413.500	88,8	200	Orang	200
4	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (HS)	Rp127.187.000	Rp109.922.844	86,4	200	layanan	200
5	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut (HS)	Rp21.094.000	Rp20.824.000	98,7	25	layanan	25
6	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan penyeberangan (HS)	Rp240.900.000	Rp240.900.000	100	365	layanan	365
7	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus (HS)	Rp279.900.000	Rp279.900.000	100	180	layanan	180
8	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Layanan kegawat daruratan dan rujukan (katagori I)	Rp7.520.000	Rp5.040.000	67	8	layanan	8
9	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD (HS)	Rp24.080.000	Rp18.698.650	77,7	20	layanan	20
10	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Layanan survei faktor risiko penyakit pes (HS)	Rp127.125.000	Rp113.838.350	89,6	45	layanan	45
11	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare (HS)	Rp2.395.000	Rp2.250.600	94	5	layanan	5
12	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD (HS)	Rp28.800.000	Rp28.750.000	99,8	80	layanan	80
13	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria (HS)	Rp13.760.000	Rp13.600.000	98,8	8	layanan	8
14	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Layanan survei faktor risiko penyakit diare (HS)	Rp14.400.000	Rp13.560.000	94,2	40	layanan	40
15	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS (HS)	Rp6.570.000	Rp6.299.295	95,9	5	layanan	5
16	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Layanan survei faktor risiko penyakit TB (HS)	Rp60.005.000	Rp58.886.020	98,1	11	layanan	11
17	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria (HS)	Rp1.940.000	Rp1.910.000	98,5	2	layanan	2
18	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (HS)	Rp2.055.620.000	Rp2.037.041.750	99,1	20	Paket	20
19	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Pelatihan kesehatan (HS)	Rp159.348.000	Rp138.874.887	87,2	26	Orang	26
20	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program	Rp530.000	Rp530.000	100	1	kegiatan	1
21	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program	Rp3.362.000	Rp3.162.000	94,1	2	kegiatan	2
22	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Koordinasi lintas program lintas sektor pengelolaan keuangan dan anggaran	Rp18.223.000	Rp17.924.680	98,4	10	kegiatan	10
23	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Koordinasi lintas program lintas sektor kepegawaian dan umum	Rp5.464.000	Rp5.431.460	99,4	8	kegiatan	8
24	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Layanan BMN	Rp11.546.000	Rp11.515.000	99,7	23	Layanan	23
25	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Layanan Hukum	Rp1.183.000	Rp1.023.000	86,5	3	Layanan	3
26	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp56.789.000	Rp53.289.100	93,8	2	Layanan	2
27	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp37.139.000	Rp36.944.948	99,5	11	Layanan	11
28	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Layanan Umum	Rp11.058.000	Rp10.774.468	97,4	3	Layanan	3
29	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Layanan Perkantoran	Rp14.323.386.000	Rp13.909.732.334	97,1	12	Layanan	12
30	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Layanan Manajemen SDM	Rp9.469.000	Rp9.468.500	100	71	Orang	71
31	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Rp8.506.000	Rp3.958.500	46,5	1	Orang	1
32	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp83.848.000	Rp83.426.342	99,5	5	Dokumen	5
33	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp89.379.000	Rp88.494.483	99	9	Dokumen	9
34	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Layanan Manajemen Keuangan	Rp64.499.000	Rp63.237.618	98	4	Dokumen	4
35	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Rp101.939.000	Rp99.044.711	97,2	2	Dokumen	2

Informasi Lainnya

A.8. Informasi Lainnya

1. Penyusutan Laporan Keuangan BKK Kelas I Banten telah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN Serang melalui aplikasi MonSAKTI.

2. Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan BKK Kelas I Banten telah dilakukan reviu oleh Satuan Kepatuhan Intern (SKI).

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Pendapatan Rp 4.022.847.282,

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 4.022.847.282, atau mencapai 157,39 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.556.040.000.

Pendapatan BKK Kelas I Banten terdiri dari Pendapatan dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2024

Uraian	per 31 Desember 2024		
	Estimasi	Realisasi	% Real Est.
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp2,556,040,000	Rp4,022,847,282	157.39
Jumlah	**Rp2,556,040,000**	**Rp4,022,847,282**	**157.39**

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami Kenaikan sebesar 52,9 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 dikarenakan adanya peningkatan vaksinasi menginitis dan kedatangan jumlah volume kapal dari dalam maupun luar negeri.

Rincian kenaikan dan penurunan realisasi pendapatan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada rincian berikut ini.

Tabel 12

Perbandingan Realisasi Pendapatan 2024 dan 2023

URAIAN	31 Des 2024	31 Des 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	Rp40,440,000	Rp15,140,000	167,1
Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	Rp2,625,805,001	Rp2,471,013,505	6,26
Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	Rp1,350,450,000	Rp138,335,000	876,22
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun	Rp6,152,281	Rp2,565,650	139,79
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN LAINNYA		Rp4,000,000	(100,00
Jumlah	**Rp4,022,847,282**	**Rp2,631,054,155**	**52.90**

Realisasi Belanja
Rp. 17.668.109.130

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 17.668.109.130 atau 97,11 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 18.193.150.000. karena adanya penambahan anggaran.

Tabel 13

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja

URAIAN	31 Desember 2024		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	Rp10,777,786,000	Rp10,418,480,496	96.67
Belanja Barang	Rp5,782,864,000	Rp5,617,438,534	97.14
Belanja Modal	Rp1,632,500,000	Rp1,632,190,100	99.98
Total Belanja	**Rp18,193,150,000**	**Rp17,668,109,130**	**97.11**

Komposisi anggaran per jenis belanja, dapat dilihat dalam grafik berikut,

Grafik 1
Komposisi Anggaran per-Jenis Belanja TA 2024

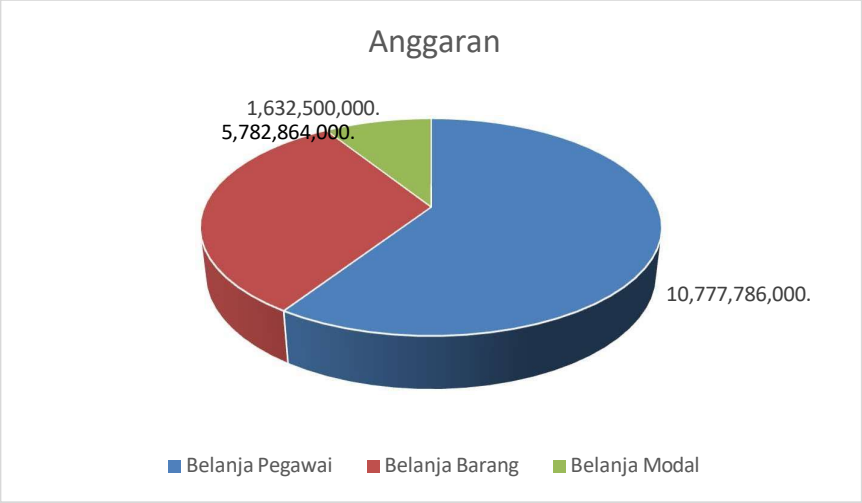

Komposisi anggaran dan realisasi per jenis belanja, dapat dilihat dalam grafik berikut,

Grafik 2
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

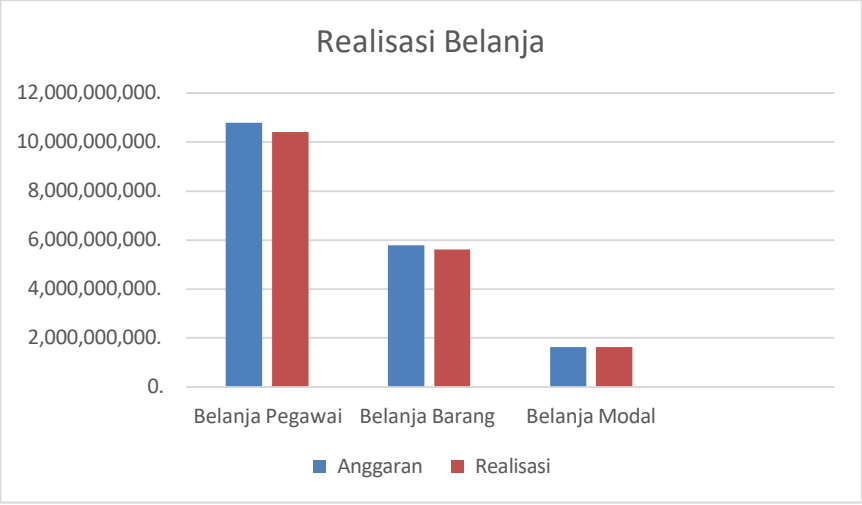

Dibandingkan dengan periode tahun anggaran sebelumnya, Realisasi Belanja sampai dengan 31

Desember 2024 meningkat sebesar 15,06 persen. Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 17.668.109.130 dan 15.355.199.085. Peningkatan ini terjadi pada belanja pegawai dan belanja modal. Perbandingan realisasi belanja disajikan sebagai berikut,

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI NETO 31 DES 2024	REALISASI NETO 31 DES 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	Rp10,418,480,496	Rp8,850,638,821	17.71
Belanja Barang	Rp5,617,438,534	Rp6,261,174,014	(10.28)
Belanja Modal	Rp1,632,190,100	Rp243,386,250	570.62
Jumlah	**Rp17,668,109,130**	**Rp15,355,199,085**	**15.06**

Belanja Pegawai

Rp 10.418.480.496

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 10.418.480.496 dan Rp 8.850.638.821. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 15

Perbandingan Realisasi Pegawai 31 Des 2024 dan 31 Des 2023

AKUN	URAIAN	31 Des 2024	31 Des 2023	NAIK (TURUN) %
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,493,065,500.	2,947,952,300.	18.49
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	48,917.	39,982.	22.35
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	275,251,860.	241,037,230.	14.19
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	91,486,116.	79,573,958.	14.97
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000.	23,580,000.	6.87
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	393,614,000.	297,405,000.	32.35
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	24,757,644.	4,086,366.	505.86
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	211,973,340.	200,241,300.	5.86
511129	Belanja Uang Makan PNS	523,595,000.	446,872,000.	17.17
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	22,685,000.	39,915,000.	(43.17)
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	125,530,800.	55,654,200.	125.55
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,673.	606.	341.09
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	12,553,080.	5,565,420.	125.55
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	2,804,844.	1,669,626.	67.99
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14,150,000.	5,625,000.	151.56
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8,545,560.	4,562,460.	87.30
511628	Belanja Uang Makan PPPK	20,942,000.	11,248,000.	86.18
512211	Belanja Uang Lembur	32,358,000.	25,478,000.	27.00
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	4,975,106,342.	4,385,398,017.	13.45
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	164,809,820.	74,734,356.	120.53
	JUMLAH	**10,418,480,496.**	**8,850,638,821.**	**17.71**

Realisasi belanja pegawai 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 17,71 persen dibandingkan 31 Desember 2023. Disebabkan bertambahnya jumlah pegawai dan PPPK.

Belanja Barang

Rp 5.617.438.534

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 5.617.438.534 dan Rp6.261.174.014

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024 mengalami Penurunan sebesar 10,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dikarenakan penurunan anggaran untuk belanja barang.

Berikut ini perbandingan realisasi belanja barang 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023,

Tabel 16

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 Des 2024	31 Des 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Keperluan Perkantoran	1,086,105,912	1,441,432,219	(24.65)
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,037,000	759,100	36.61
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	116,412,000	202,222,000	(42.43)
Belanja Barang Operasional Lainnya	163,468,000	136,764,000	19.53
Belanja Bahan	155,320,015	226,128,945	(31.31)
Belanja Honor Output Kegiatan	6,640,000	18,000,000	(63.11)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	150,410,868	167,189,368	(10.04)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	534,561,615	850,386,127	(37.14)
Belanja Langganan Listrik	341,128,293	288,847,030	18.10
Belanja Langganan Telepon	1,915,456	579,957	230.28
Belanja Langganan Air	11,112,346	9,956,486	11.61
Belanja Jasa Profesi		2,700,000	(100.00)
Belanja Jasa Lainnya	852,224,508	450,714,268	89.08
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	416,860,410	322,183,745	29.39
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13,085,000	3,855,000	239.43
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	479,600,228	486,736,700	(1.47)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	602,218,001	908,941,069	(33.75)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	682,756,422	717,340,000	(4.82)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		24,440,000	-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,442,460	1,998,000	72.30
Jumlah Belanja Kotor	**5,618,298,534**	**6,261,174,014**	**(10.27)**
Pengembalian Belanja	(860,000)		-
Jumlah Belanja	**5,617,438,534**	**6,261,174,014**	**(10.28)**

Belanja Modal Rp 1.632.190.10

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1.632.190.100 dan Rp243.386.250. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 570,62 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 Des 2024	31 Des 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1,632,190,100	Rp243,386,250	570.62
Jumlah Belanja Kotor	**Rp1,632,190,100**	**Rp243,386,250**	**570.62**
Jumlah Belanja	**Rp1,632,190,100**	**Rp243,386,250**	**570.62**

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.632.190.100, mengalami peningkatan sebesar 570,62 persen bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2023 sebesar Rp243,386,250.dikarenakan adanya pengadaan modal yaitu kenderaan Ambulance dan peralatan lainnya.

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 Des 2024	31 Des 2023
Mobil Ambulance	955,000,000	
Meja Kerja Kayu	157,342,500	
A.C. Split	32,500,000	55,500,000
Televisi	23,300,000	23,892,000
Kamera Udara	15,268,050	
Kursi Zeis	208,215,000	
Kamera Digital	28,350,000	
P.C Unit	75,812,750	
Lap Top	136,401,800	144,300,000
Mic Conference		5,133,750
Printer		6,160,500
scenner		8,400,000
Jumlah Belanja Kotor	**Rp1,632,190,100**	**Rp243,386,250**

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar Rp 2.039.258.541

C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar BKK Kelas I Banten per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.039.258.541 dan Rp 1.798.160.585.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan

keuangan.

Persediaan Rp 2.039.258.541

C.1.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.039.258.541 dan Rp 1.798.160.585.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Perbandingan Saldo Persediaan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

JENIS	31 Des 2024	31 Des 2023
Barang Konsumsi	Rp1,870,412,428	Rp1,413,403,395
Persediaan Lainnya	Rp168,846,113	Rp381,729,190
Jumlah	**Rp2,039,258,541**	**Rp1,795,132,585**

Aset Tetap Rp 25.844.704.216

C.2. Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap BKK Kelas I Banten per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp25.844.704.216 dan Rp 24.864.795.830.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Tanah Rp14.705.265.280,

C.2.1 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa tanah yang dimiliki BKK Kelas I Banten per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp14.705.265.280 dan Rp

14.705.265.280.

Tanah diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Tabel 20
Mutasi Tanah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	**Rp**	**14,705,265,280**
Saldo per 31 Desember 2024	**Rp**	**14,705,265,280**

Peralatan dan Mesin Rp20.032.740.297,

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp20.032.740.297 dan Rp17.362.050.197

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Tabel 21
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo per 31 Desesmber 2024	**Rp**	**18,340,350,197**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	Rp	(16,471,301,160)
Nilai Buku per 31 Desesmber 2024	**Rp**	**1,869,049,037**

Transaksi mutasi tambah peralatan dan mesin adalah:

1. Transaksi pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp978.300.000 berupa pembelian Mobil Ambulance Rp955.000.000 dan TV 75 Inch Rp 23.300.000

Gedung dan Bangunan Rp8.708.186.698

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp8.708.186.698, dan Rp8.708.186.698.

Tabel 22
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2023	**Rp**	**8,708,186,698**
Saldo per 31 Des 2024	**Rp**	**8,708,186,698**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2024	Rp	(1,130,186,899)
Nilai Buku per 31 Des 2024	**Rp**	**7,577,999,799**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp(16.627.524.993)

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp (16.627.524.993) dan Rp(15.910.706.345)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Tabel 23
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp20.032.740.297	Rp16.471.301.160	Rp3.561.439.137
2	Gedung dan Bangunan	Rp8.708.186.698	Rp1.130.186.899	Rp7.577.999.799
Jumlah		**Rp28.740.926.995**	**Rp17.601.488.059**	**Rp11.139.438.936**

Aset Lain-Lain Rp100.214.320

C.3.3. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp100.214.320 dan Rp100.214.320. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BKK Kelas I Banten serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 pada BKK Kelas I Banten sebagai berikut:

Tabel 24
Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2024

Saldo Nilai Perolehan per 30 September 2023	**Rp**	**100.214.320**
Mutasi tambah:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Mutasi kurang:		
Likuidasi Keluar Henti Guna	Rp	-
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp	-
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	Rp	-
Saldo per 30 September 2024	**Rp**	**100.214.320**
Akumulasi Penyusutan dan amortisasi s.d. 30 Sep 2024	Rp	(100.214.320)
Nilai Buku per 30 September 2024	**Rp**	**-**

Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya Rp(100.214.320).

C.3.4. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp(100.214.320) dan Rp(100.214.320).

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Kewajiban Jangka Pendek Rp 569.826.364

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Aset Lainnya BKK Kelas I Banten per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 569.826.364 dan Rp 0.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Keterangan	31 Des 2024	31 Des 2023
Hutang Kepada Pihak ketiga	84,024,000	-

Utang kepada Pihak Ketiga Rp 480.442.364

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 480.442.364 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/ atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain.

Tabel 25
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Keterangan	30Sep 2024	30-Sep-23
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	335658364	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	144784000	-
Jumlah	**480,442,364**	**-**

Ekuitas Rp 26.668.604.104

C.5. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 26.668.604.104 dan Rp 26.662.956.415. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

Pendapatan PNBP

Rp2.565.255.000

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 2.565.255.000 dan Rp 1.937.563.504. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 26
Perbandingan Rincian Pendapatan-LO s.d. 31 Desember 2024 dan 2023

	31 Des 2024	'31 Des 2023	%
Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	Rp40,440,000	Rp15,140,000	167.11
Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	Rp2,625,805,001	Rp2,471,013,505	6.26
Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	Rp1,350,450,000	Rp138,335,000	876.22
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp6,152,281	Rp2,565,650	139.79
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		Rp4,000,000	(100.00)
Jumlah	**Rp4,022,847,282**	**Rp2,631,054,155**	**52.90**

Berdasarkan data tersebut, Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak periode sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar 32,40 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya

Beban Pegawai Rp7.972.551.891

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.972.551.891 dan Rp6.602.692.172. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 27
Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	'31 Des 2024	'31 Des 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	Rp3,493,065,500	Rp2,947,952,300	18.49
Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp48,917	Rp39,982	22.35
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	Rp275,251,860	Rp241,037,230	14.19
Beban Tunj. Anak PNS	Rp91,486,116	Rp79,573,958	14.97
Beban Tunj. Struktural PNS	Rp25,200,000	Rp23,580,000	6.87
Beban Tunj. Fungsional PNS	Rp393,614,000	Rp297,405,000	32.35
Beban Tunj. PPh PNS	Rp24,757,644	Rp4,086,366	505.86
Beban Tunj. Beras PNS	Rp211,973,340	Rp200,241,300	5.86
Beban Uang Makan PNS	Rp523,595,000	Rp446,872,000	17.17
Beban Tunjangan Umum PNS	Rp22,685,000	Rp39,915,000	(43.17)
Beban Gaji Pokok PPPK	Rp125,530,800	Rp55,654,200	125.55
Beban Pembulatan Gaji PPPK	Rp2,673	Rp606	341.09
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	Rp12,553,080	Rp5,565,420	125.55
Beban Tunjangan Anak PPPK	Rp2,804,844	Rp1,669,626	67.99
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	Rp14,150,000	Rp5,625,000	151.56
Beban Tunjangan Beras PPPK	Rp8,545,560	Rp4,562,460	87.30
Beban Uang Makan PPPK	Rp20,942,000	Rp11,248,000	86.18
Beban Uang Lembur	Rp32,358,000	Rp25,478,000	27.00
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Keg	Rp4,975,106,342	Rp4,385,398,017	13.45
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegi	Rp164,809,820	Rp74,734,356	120.53
Jumlah	**Rp10,418,480,496**	**Rp8,850,638,821**	**17.71**

Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 20,75 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya

Beban Persediaan Rp281.532.799

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 281.532.799 dan Rp839.244.829.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	'31 Des 2024	'31 Des 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	Rp439.625.092	Rp1.016.460.945	(56,75)
Beban Persediaan Bahan Baku	Rp0	Rp38.245.716	(100,00)
Beban Persediaan Lainnya	Rp216.421.077	Rp115.254.583	87,78
Jumlah	**Rp656.046.169**	**Rp1.169.961.244**	**(43,93)**

Beban Barang dan Jasa Rp 1.966.587.266

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1.966.587.266 dan Rp2.161.303.952.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain

berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 29
Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024 dan 2023

	31 Des 2024	31-Dec-23	%
Beban Keperluan Perkantoran	Rp1,086,105,912	Rp1,441,432,219	(24.65)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp1,037,000	Rp759,100	36.61
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	Rp116,412,000	Rp202,222,000	(42.43)
Beban Barang Operasional Lainnya	Rp163,468,000	Rp136,764,000	19.53
Beban Bahan	Rp155,320,015	Rp226,128,945	(31.31)
Beban Honor Output Kegiatan	Rp6,640,000	Rp18,000,000	(63.11)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	Rp150,410,868	Rp167,189,368	(10.04)
Beban Langganan Listrik	Rp341,128,293	Rp288,847,030	18.10
Beban Langganan Telepon	Rp1,915,456	Rp579,957	230.28
Beban Langganan Air	Rp11,112,346	Rp9,956,486	11.61
Beban Jasa Profesi		Rp2,700,000	(100.00)
Beban Jasa Lainnya	Rp852,224,508	Rp450,714,268	89.08
	Rp2,885,774,398	**Rp2,945,293,373**	**(2.02)**

Beban barang dan jasa sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami Penurunan sekitar 9,01 persen dibandingkan beban barang dan jasa pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Beban Pemeliharaan Rp689.684.479

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp689.684.479 dan Rp586.085.114. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Tabel 30
Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2024	31 Des 2023	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Banguna	Rp416.860.410	Rp322.183.745	**29,39**
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp479.600.228	Rp486.736.700	**(1,47)**
Beban Persediaan suku cadang	Rp0	Rp1.223.114	**(100,00)**
Jumlah	**Rp896.460.638**	**Rp810.143.559**	**10,65**

Beban Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar 17,68 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Beban Perjalanan Dinas Rp933.124.938

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp933.124.938 dan Rp1.043.262.466. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2024	31 Des 2023	%
Beban Perjalanan Biasa	Rp601.358.001	Rp908.941.069	(33,84)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp682.756.422	Rp717.340.000	(4,82)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp3.442.460	Rp24.440.000	(85,91)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		Rp1.998.000	
Jumlah	**Rp1.287.556.883**	**Rp1.652.719.069**	**(22,09)**

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sekitar 10,56 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini antara lain disebabkan meningkatnya perjalanan dinas peket meeting luar kota.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp68.239.101.737

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp*772.699.257* dan Rp *716.818.648.*

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tabel 32
Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN BEBAN	31 Des 2024	31 DES 2023	% Naik (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp1.232.100.676	Rp1.246.065.162	(1,12)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp199.056.038	Rp199.056.038	-
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	**Rp1.431.156.714**	**Rp1.445.121.200**	**(0,97)**

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp(6.152.281)

D.9 Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jumlah Surplus(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing masing Rp 6.152.281dan Rp3.300.700.

Tabel 33
Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 Des 2024	31 Des 2023	%
Kegiatan Non Operasional			
Pendapatan pelepasan aset non lancar	-	4,000,000	(100.00)
Beban pelepasan aset non lancar	-	3,264,950	(100.00)
Surplus/Defisit pelepasan aset non lancar	**-**	**735,050**	**(100.00)**
Pendapatan keg. Non operasional lainnya	6,152,281	2565650	139.79
Surplus/Defisit keg. Non Ops Lainnya	**6,152,281**	**2,565,650**	**139.79**
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**6,152,281**	**3,300,700**	**86.39**

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas Awal Rp26,662,956,415

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 26,662,956,415 dan Rp 27 ,596,928,126

Defisit LO Rp(9,965,117,740)

E.2 Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah defisit sebesar Rp(9,965,117,740) dan Rp(10,052,283,586). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

Transaksi Antar Entitas Rp9,970,765,429

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp9,970,765,429 dan Rp9,026,707,922.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp248.580.000 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 34
Transfer Masuk untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024

No	Nama Barang	Satker pengirim	Kuantitas	Nilai Per Item	Jumlah
1	Air Purifier	Dit. Penyehatan Lingkungan	10	4.730.000	473000
2	Hygine Kit Keluarga		20	631.500	126300
3	Oksigen Konsentrator	Pusat Krisis Kesehataa	10	11.520.000	1152000
4	Vaksin Influenza (FLUBIO)	Dit. Surkarkes	500	116.900	584500
5	Vaksin Tyfoid	Dit. Surkarkes	75	200.000	150000
6	Buku ICV 2024	Dit. Surkarkes	15500	11.433	1772115
7	Buku ICV 2022	Dit. Surkarkes	2250	10.309	231952
8	Buku ICV Relokasi BKK Ambon	BKK Ambon	800	8.030	6424(
9	Buku ICV Relokasi Ambon	BKK Ambon	200	10.309	20618
10	Emergency Kit	Dit. Surkarkes	1	1.593.960	1593(
11	Vaksin Meningitis Formening	Dit. Surkarkes	1000	102.000	102000(
JUMLAH					561.066.5

Rincian Transfer Masuk selengkapnya terdapat pada lampiran.

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp149.076.000 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 35
Transfer Keluar untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024

No	Nama Barang	Satker penerima	Kuantitas	Nilai Per Item	Jumlah
1	Vaksin Meningitis	BKK Bandung	1000	124.986	12498600
2	Buku ICV	BBKK Soekarno Hatta	1000	8.030	803000
3	Buku ICV	BKK Panjang	2000	8.030	1606000
4	Vaksin Meningitis	BKK AMBON	500	124.986	6249300
JUMLAH					211.569.000

Rincian Transfer Keluar selengkapnya terdapat pada lampiran.

Ekuitas Akhir Rp26,668,604,104

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp26,668,604,104 dan Rp26,571,352,462. Nilai Ekuitas Akhir diperoleh dari Nilai Ekuitas Awal Rp 26,662,956,415 ditambah Nilai kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp5,647,689 Sehingga nilai Ekuitas Akhir Rp26,668,604,104.

F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya

F.1. Keterangan RPATA

1. Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Tenaga Pengamanan/Petugas Satpam sebanyak 3 orang untuk bulan Desember 2024, sesuai BAST Nomor KN.01.04/8.1/21529/2024 Tanggal 31-12-2024=16.818.000

2. Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Tenaga Kesehatan sebanyak 2 orang dan Tenaga Administrasi sebanyak 1 orang untuk bulan Desember 2024 sesuai BAST Nomor KN.01.04/8.1/21535/2024 Tanggal 31-12-2024=16.800.000

3. Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Tenaga Kesehatan sebanyak 1 orang dan Tenaga Administrasi sebanyak 3 orang untuk bulan Desember 2024 sesuai BAST Nomor KN.01.04/8.1/21533/2024 Tanggal 31-12-2024=22.400.000

4. Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Tenaga Supir/Pengemudi sebanyak 1 orang untuk bulan Desember 2024. sesuai BAST Nomor KN.01.04/8.1/21531/2024 Tanggal 31-12-2024= 5.606.000

5. Pembayaran Pengadaan Petugas Administrasi sebanyak 2 orang dan Petugas Pengemudi 1 orang untuk bulan Desember 2024 sesuai BAST Nomor KN.01.04/8.1/21539/2024 Tanggal 31-12-2024= 16.800.000

6. Pembayaran Pengadaan Tenaga Pelaksana Pengamanan sebanyak 1 orang untuk bulan Desember 2024 sesuai BAST/BAPP Nomor KN.01.04/8.1/21537/2024 Tanggal 31-12-2024= 5.600.000

F.2. Laporan Realisasi Kinerja

LAPORAN REALISASI KINERJA

Tahun Anggaran 2024

Periode s.d bulan : 2024-09
Kementerian Negara/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Eselon 1 : 024.05 - DITJEN PENCEGANAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
Wilayah/Provinsi : 29.51 - KOTA TANGERANG/BANTEN
Satuan Kerja : 415950 - BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANTEN

Halaman : 1
Tanggal Cetak : 16-10-2024

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
07	**KESEHATAN**	**17,539,150,000.00**	**12,466,445,403.00**	71.08%							
03	**PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT**	**2,712,830,000.00**	**2,200,794,547.00**	81.13%							
DO	**Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**	**2,712,830,000.00**	**2,200,794,547.00**	81.13%							
4249	**Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah**	**2,712,830,000.00**	**2,200,794,547.00**	81.13%							
PEA	**Koordinasi**	**24,660,000.00**	**15,830,000.00**	**64.19%**							
001	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah (HS)	24,660,000.00	**15,830,000.00**	**64.19%**	**10.0000**	**Kegiatan**	**10.0000**	**100%**	**35.81%**	**(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran**	**Efisiensi Anggaran**
QAA	**Pelayanan Publik kepada masyarakat**	**171,526,000.00**	**129,313,983.00**	**75.39%**							
011	Pelayanan kesehatan haji (HS)	108,000,000.00	**100,962,483.00**	**93.48%**	**8,750.0000**	**Orang**	**8,750.0000**	**100%**	**6.52%**	**(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran**	**Efisiensi Anggaran**
012	Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (HS)	63,526,000.00	**28,351,500.00**	**44.63%**	**200.0000**	**Orang**	**200.0000**	**100%**	**55.37%**	**(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran**	**Efisiensi dan Optimalisasi**
QAH	**Pelayanan Publik Lainnya**	**955,676,000.00**	**661,656,641.00**	**69.23%**							
016	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (HS)	127,187,000.00	**87,090,176.00**	**68.47%**	**200.0000**	**Layanan**	**100.0000**	**68.47%**	**0%**	**(00)**	**Kegiatan sesuai rencana**
017	layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut (HS)	21,094,000.00	**19,974,000.00**	**94.69%**	**25.0000**	**Layanan**	**25.0000**	**100%**	**5.31%**	**(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran**	**Efisiensi dan Optimalisasi**

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
U01	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan penyeberangan (HS)	240,900,000.00	162,800,000.00	67.58%	365.0000	Layanan	273.0000	84.47%	16.89%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Efisiensi dan optimalisasi
U04	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus (HS)	279,900,000.00	194,060,000.00	69.33%	180.0000	Layanan	176.0000	69.33%	0%	(00)	Situasi khusus dilaksanakan kembali di akhir tahun pada saat nataru
U06	Layanan kegawat daruratan dan rujukan (katagori I)	7,520,000.00	0.00	0%	8.0000	Layanan	6.0000	75%	75%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Kegiatan sudah dilaksanakan, pencairan anggaran dalam proses
U07	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD (HS)	24,080,000.00	12,718,200.00	52.82%	20.0000	Layanan	20.0000	100%	47.18%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Efisiensi dan optimalisasi
U08	Layanan survei faktor risiko penyakit pes (HS)	127,125,000.00	107,959,950.00	84.92%	45.0000	Layanan	45.0000	100%	15.08%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Efisiensi dan Optimalisasi
U09	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare (HS)	2,395,000.00	479,000.00	20%	5.0000	Layanan	4.0000	80%	60%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Efisiensi dan Optimalisasi
U11	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD (HS)	28,800,000.00	19,670,000.00	68.3%	80.0000	Layanan	78.0000	84%	15.7%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Efisiensi dan Optimalisasi
U12	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria (HS)	13,760,000.00	6,800,000.00	49.42%	8.0000	Layanan	7.0000	86.45%	37.03%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Efisiensi dan Optimalisasi
U13	Layanan survei faktor risiko penyakit diare (HS)	14,400,000.00	13,560,000.00	94.17%	40.0000	Layanan	40.0000	100%	5.83%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Efisiensi dan Optimalisasi
U14	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS (HS)	6,570,000.00	4,939,295.00	75.18%	5.0000	Layanan	5.0000	100%	24.82%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Efisiensi dan Optimalisasi
U15	Layanan survei faktor risiko penyakit TB (HS)	60,005,000.00	30,666,020.00	51.11%	11.0000	Layanan	11.0000	100%	48.89%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Efisiensi dan Optimalisasi
U20	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria (HS)	1,940,000.00	940,000.00	48.45%	2.0000	Layanan	2.0000	100%	51.55%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Efisiensi dan Optimalisasi
RAB	**Sarana Bidang Kesehatan**	**1,401,620,000.00**	**1,343,404,930.00**	**95.85%**							
001	Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (HS)	1,401,620,000.00	1,343,404,930.00	95.85%	20.0000	Paket	20.0000	100%	4.15%	(00)	Efisiensi dan Optimalisasi
TBC	**Layanan Manajemen SDM Internal**	**159,348,000.00**	**50,588,993.00**	**31.75%**							
001	Pelatihan kesehatan (HS)	159,348,000.00	50,588,993.00	31.75%	26.0000	Orang	23.0000	85.89%	54.14%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Efisiensi dan Optimalisasi

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
90	KESEHATAN LAINNYA	14,826,320,000.00	10,265,650,856.00	69.24%							
WA	Program Dukungan Manajemen	14,826,320,000.00	10,265,650,856.00	69.24%							
4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	14,826,320,000.00	10,265,650,856.00	69.24%							
AEA	Koordinasi	24,826,000.00	11,517,680.00	46.39%							
501	Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program	1,748,000.00	530,000.00	30.32%	1.0000	Kegiatan	1.0000	100%	69.68%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Efisiensi dan Optimalisasi
502	Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program	5,632,000.00	0.00	0%	2.0000	Kegiatan	2.0000	100%	100%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Efisiensi dan Optimalisasi
503	Koordinasi lintas program lintas sektor pengelolaan keuangan dan anggaran	11,698,000.00	6,453,680.00	55.17%	10.0000	Kegiatan	10.0000	100%	44.83%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Efisiensi dan Optimalisasi
505	Koordinasi lintas program lintas sektor kepegawaian dan umum	5,748,000.00	4,534,000.00	78.88%	8.0000	Kegiatan	8.0000	100%	21.12%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Efisiensi dan Optimalisasi
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	14,442,393,000.00	10,046,260,868.00	69.56%							
956	Layanan BMN	15,428,000.00	2,950,000.00	19.12%	23.0000	Layanan	23.0000	100%	80.88%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Efisiensi dan Optimalisasi
957	Layanan Hukum	3,706,000.00	0.00	0%	3.0000	Layanan	2.0000	70%	70%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Efisiensi dan Optimalisasi
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	45,347,000.00	36,789,700.00	81.13%	2.0000	Layanan	2.0000	100%	18.87%	(00)	Efisiensi dan Optimalisasi
960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	35,856,000.00	31,912,448.00	89%	11.0000	Layanan	11.0000	100%	11%	(00)	Efisiensi dan Optimalisasi
962	Layanan Umum	18,670,000.00	10,774,468.00	57.71%	3.0000	Layanan	3.0000	100%	42.29%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Efisiensi dan Optimalisasi
994	Layanan Perkantoran	14,323,386,000.00	9,963,834,252.00	69.56%	12.0000	Layanan	9.0000	79.3%	9.74%	(00)	Efisiensi dan Optimalisasi
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	18,853,000.00	11,368,500.00	60.3%							

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
954	Layanan Manajemen SDM	11,353,000.00	9,468,500.00	83.4%	71.0000	Orang	71.0000	100%	16.6%	(00)	Efisiensi dan Optimalisasi
996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	7,500,000.00	1,900,000.00	25.33%	1.0000	Orang	1.0000	100%	74.67%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Efisiensi dan Optimalisasi
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	340,248,000.00	196,503,606.00	57.75%							
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	77,925,000.00	58,387,760.00	74.93%	5.0000	Dokumen	4.0000	75.41%	0.48%	(00)	Efisiensi dan Optimalisasi
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	93,569,000.00	77,709,983.00	83.05%	9.0000	Dokumen	9.0000	100%	16.95%	(00)	Efisiensi dan Optimalisasi
955	Layanan Manajemen Keuangan	62,387,000.00	46,700,249.00	74.86%	4.0000	Dokumen	4.0000	100%	25.14%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Efisiensi dan Optimalisasi
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	106,367,000.00	13,705,816.00	12.89%	2.0000	Dokumen	2.0000	100%	87.11%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Efisiensi dan Optimalisasi